

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan hasil kajian, dan analisis dari data-data yang diperoleh selama penelitian yaitu tentang bagaimana upaya PPP dalam meningkatkan perolehan hasil suara pada Pemilu tahun 1977 di Kodya Bandung. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini setelah menganalisis semua fakta-fakta dari berbagai sumber yang relevan dengan pembahasan.

Kodya Bandung termasuk salah satu wilayah yang terletak di provinsi Jawa Barat. Kodya Bandung secara historis politis merupakan basis kekuatan partai-partai politik. Hal ini tentu Kodya Bandung sebagai *hinterland* Ibukota Jakarta secara tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakatnya lebih tinggi dari daerah lain. Tingkat pendidikan yang terdapat di Kodya Bandung cukup lengkap dari jenjang pemula seperti TK, dan SD, sampai jenjang perguruan tinggi. Sedangkan penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai pedagang dan pegawai swasta, juga mayoritas menganut agama Islam. Sebagai konsekuensi dari semua itu Kodya Bandung mempunyai kesadaran politik yang tinggi.

Lahirnya PPP di Kodya Bandung berawal dari di keluarkannya kebijakan pemerintah tahun 1973 yang isinya bahwa partai-partai yang ada termasuk partai-partai Islam harus berfusi menjadi satu partai. Partai-partai Islam itu adalah NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).

Kebijakan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi dari perubahan sistem politik tingkat nasional. Salah satu ciri dari sistem politik di masa Orde Lama adalah menganut sistem banyak partai. Orde Baru tidak menghendaki dengan sistem multi partai karena dengan sistem tersebut justru malah memicu terjadinya konflik. Sesungguhnya kebijakan tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memenangkan Pemilu berikutnya. Strategi yang digunakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi ditempatkan sebagai prioritas dari kegiatan pemerintahannya. Sementara itu di sisi lain pembangunan politik ditekan semaksimal mungkin agar dapat menjamin stabilitas politik bagi pembangunan ekonomi.

Sebagai konsekuensi dari semua itu adalah PPP harus berlapang dada menerima keputusan yang dikeluarkan pemerintah, sekaligus harus siap dengan kemungkinan terjadinya konflik intern di tubuh PPP sendiri. Akan tetapi dengan difusikannya partai-partai Islam ke dalam PPP menjadi kekuatan tersendiri yaitu fusi partai menghasilkan keberuntungan yang tidak disengaja, karena menjadi lebih mudah menyatukan seluruh umat Islam. Jadi kelahiran PPP tidak terlepas dari campur tangan negara khususnya dalam hal pengelolaan partisipasi politik, dan menjadi salah satu produk dari rekayasa politik Orde Baru di masa awal pemerintahannya. Bahkan secara luas, campur tangan Orde Baru tidak hanya tertuju pada partai politik, tetapi juga merambah kepada organisasi keagamaan.

Pemilu tahun 1977 PPP di Kodya Bandung tidak pernah mengalami konflik internal yang berakibat fatal sebagaimana yang terjadi di pusat. Tetapi dengan difusikannya organisasi-organisasi Islam ke dalam PPP sedikit banyaknya

perbedaan pendapat itu terkadang mencuat kepermukaan, tapi permasalahan tersebut segera diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Strategi yang digunakan PPP di Kodya Bandung untuk memenangkan Pemilu tahun 1977 yaitu dengan cara meraih simpatisan dari para tokoh agama (ulama, ustadz, kiai), mahasiswa, pegawai negeri sipil, maupun dari masyarakat yang berprofesi baik sebagai pedagang, pegawai swasta, petani, buruh dan lain-lain. Pada waktu menjelang Pemilu PPP berupaya meraih simpati masyarakat secara terbuka yaitu dengan tidak mengintimidasi, dan mengancam, akan tetapi sebaliknya memberikan nasehat, anjuran, juga pendidikan politik secara tidak langsung. Para tokoh ulama menggunakan kesempatan tersebut dengan mengadakan kegiatan seperti pengajian, kuliah subuh, bahkan tablig akbar, dalam isi ceramahnya disisipkan unsur-unsur politik. Tidak hanya ketika menjelang kampanye, tetapi ketika masa kampanye para tokoh agama (Ulama) lebih banyak dilibatkan, di samping tokoh-tokoh politik lainnya.

Ulama banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kampanye, cara ini merupakan lahan yang cukup strategis, karena ulama dianggap sebagai panutan, pemimpin keagamaan yang memiliki pengetahuan keagamaan yang luas, di samping sekaligus sebagai partisan dalam Pemilu tahun 1977, yang mampu menggiring massa sebanyak-banyaknya untuk mendukung program-program yang ditawarkannya.

Program-program yang ditawarkan oleh para juru kampanye ketika orasi di lapangan adalah yang berhubungan dengan politik, keagamaan, dan sosial

dengan menawarkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan juga mencakup visi dan misi partai.

Strategi lain yang dilakukan PPP di Kodya Bandung untuk meraih massa pendukung dalam Pemilu tahun 1977, yaitu dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk (door to door), bincang-bincang ringan, pementasaan atau pagelaran seni, yaitu dengan pementasan wayang golek semalam suntuk, bakti sosial dengan cara membersihkan mesjid, penanaman pohon di tempat-tempat yang strategis, juga kampanye dialogis yang diselenggarakan oleh masyarakat kampus., baik oleh dosen maupun mahasiswanya, dan lain-lain.

Keinginan masyarakat Kodya Bandung untuk mendukung PPP dalam Pemilu tahun 1977 hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama* PPP merupakan partainya umat Islam, paling tidak meskipun secara struktural tidak adanya ikatan antara PPP dengan masyarakat Islam Kodya Bandung, akan tetapi ikatan psikologis keagamaan diantara mereka sangat erat, *kedua* PPP dapat meyakinkan para pemilih kalangan umat Islam dimana PPP terlihat kompak dalam menangani semua permasalahan yang timbul, *ketiga* berhasilnya para Jurkam PPP meyakinkan bahwa PPP sebagai pewaris dan penerus perjuangan partai-partai Islam, *keempat* adanya kecenderungan di kalangan mahasiswa dan pemuda untuk mengharapkan agar PPP sebagai kekuatan alternatif yang dapat mengimbangi dominasi Golkar sehingga mekanisme demokrasi tidak timpang.

Upaya PPP dalam menggalang massa tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik yang bersifat internal maupaun eksternal. Hambatan atau masalah

internal PPP terkait dengan pendanaan yang sangat minim, sedangkan hambatan yang bersifat eksternal yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan PPP, seperti kebijakan pemerintah tentang *floating mass*, yang diatur dalam Undang-Undang yang berisi pembatasan terhadap struktur organisasi politik hanya pada tingkat daerah tingkat II, *monoloyalitas* bahwa setiap PNS harus mendukung Golkar, dan juga kebijakan tentang Dwi Fungsi ABRI (TNI). Semua kebijakan itu sangat menguntungkan Golkar, dan peraturan itu telah menambah proses Pemilu semakin tidak Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).

Pemilu tahun 1977 di Kodya Bandung secara umum lancar, aman dan tertib, serta penyelenggaraan Pemilu dapat terwujud dengan baik, sehingga berdasarkan perolehan hasil Pemilu tahun 1977 sebagai praktek dari demokrasi, PPP mampu menaikkan perolehan suaranya sebanyak enam persen, yaitu dari 122.744 suara yang sah atau 24, 97% pada Pemilu tahun 1971 menjadi 186.891 suara yang sah atau 30,97% pada Pemilu tahun 1977. keberhasilan ini tentu didasarkan atas tekad dan kerjasama yang solid antar pengurus partai juga adanya simpati dari para pemilihnya.